

**PERAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN DARI SEKTOR PAJAK  
RUMAH KOS LEBIH DARI 10 KAMAR**

**JURNAL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

**Oleh :**

**ANGGA WILLIANTINO**

**NIM.1050101071110058**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2015**

PERAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN DARI SEKTOR PAJAK RUMAH  
KOS LEBIH DARI 10 KAMAR, ANGGA WILLIANTINO, AGUS YULIANTO,  
SH, MH, LUTFI EFFENDI, SH, M.Hum. Hukum Administrasi Negara, Fakultas  
Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2015, email: [williantinoangga@gmail.com](mailto:williantinoangga@gmail.com)

### **Abstrak**

Dalam penulisan skripsi ini dibahas tentang Peran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Dalam Optimalisasi Penerimaan Dari Sektor Pajak Rumah Kos Lebih Dari 10 Kamar. Kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajiban membayar pajak mengenai usaha rumah kos yang lebih dari 10 kamar sangat berperan penting guna membantu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menggali pendapatan asli daerah, Kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat kurang memiliki kesadaran terhadap pajak. Salah satu sektor yang menjadi bertambahnya pendapatan dari suatu daerah adalah sektor pajak. Karena pajak merupakan sumber pendapatan dari suatu daerah. Untuk itu Dinas Pendapatan yang memiliki kewenangan dalam mengelola pajak tersebut telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pengelolaan pajak rumah kos dengan kamar lebih dari 10 agar masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan. Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi adalah dengan secara turun langsung ke lapangan untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap pajak daerah dan retribusi, melakukan pendataan secara langsung terhadap para wajib pajak, dan melakukan penagihan pajak terhadap para obyek pajak dengan mengikut sertakan instansi-instansi lain yang saling berkaitan. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dalam hal sarana dan prasarana yang kurang dapat menjadi kendala dalam menunjang kinerja pegawai terkait dengan aktifitas dan mobilitas kantor.

Kata Kunci : Optimalisasi Penerimaan, Pajak Rumah Kos Lebih Dari 10 Kamar.

## *Abstract*

*This reasearch explains about The Role of Regional Finance Government of Banyuwangi (Dinas Pendapatan Daerah Banyuwangi) in Tax Income Optimalization of Boarding House More Than Ten Rooms. Citizen awareness in paying the tax of boarding house which is more than 10 rooms is considered as important thing to help Banyuwangi Government to increase the origin region's income. The lack of communication and socialization between government and citizen also becomes one of the reason citizen doesn't aware in the tax paying. One of the factors which help the region's income is from tax sector, because tax is one of the great source to increase the region's income itself. Because of that matter, the Finance Government which has the authority of tax managing has done many ways to help the increasing of tax from boarding house more than ten rooms so that the problem can be solved. The efforts which are done by the government such as direct socialization to citizen about the important of tax paying and retribution awareness, taking the data directly to tax payers, and collecting the tax from tax objects with the participation of other related institutions. Meanwhile, the problem which is faced by Regional Finance Government of Banyuwangi (Dinas Pendapatan Daerah Banyuwangi) is the lacking of tools and infrastructures which can be the obstacle to support the workers' office activities and mobilities.*

*Keywords: Income Optimalization, Tax of Boarding House More Than Ten Rooms*

.

## **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan suatu negara yang menerapkan otonomi daerah, sehingga pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya sendiri serta kepentingan masyarakat untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pada penyelenggaraannya pemerintahan daerah, daerah diberikan kewenangan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Pemerataan pembangunan di suatu daerah yang merupakan program dari pemerintahan daerah itu sendiri sebagai daerah otonom, sehingga menghindarkan daerah dari pemerataan pembangunan yang kurang merata yang tidak merata. Pemerataan daerah dilakukan oleh pemerintah bukan hanya untuk kemajuan daerah itu sendiri, tetapi untuk kepentingan yang mencakup aspek kehidupan masyarakat agar dapat berjalan secara seimbang di semua bidang dalam rangka untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Pemerataan pembangunan daerah sesungguhnya merupakan tanggung jawab warga negara dan masyarakat itu sendiri, sesuai kaitannya dengan pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah. Pendapatan asli daerah dan pengelolaan pendapatan asli daerah itu sendiri menjadi sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah yang didasarkan pada prinsip yang luas, nyata dan bertanggung jawab mensyaratkan adanya tata kelola pemerintahan

daerah yang sangat baik. Suatu tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya transparansi dalam pengelolaan pemerintahan daerah, partisipasi yang aktif dalam masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, untuk menciptakan tata kelola yang baik, seluruh elemen pemerintahan daerah harus senantiasa mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan transparan, partisipatif, dan akuntabel<sup>1</sup>.

Partisipasi masyarakat merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Partisipasi masyarakat harus dipahami sebagai wujud keterwakilan (*representativeness*) produk kebijakan. Partisipasi masyarakat itu sendiri dapat diwujudkan (*representative*) melalui proses pemilihan (*election*) yang baik, sehingga peranan DPRD di dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan oleh kepala daerah<sup>2</sup>. Dengan demikian, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan dapat tercapai.

Upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan daerah perlu untuk ditingkatkan, salah satunya dengan memberikan pembinaan serta pengarahan kepada masyarakat agar pemerataan pembangunan yang diinginkan dapat terwujud, selain peran utama masyarakat sebagai pendukung proses pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Dari jenis pajak hotel tersebut, masyarakat kurang memahami tentang pajak rumah kos dengan kamar lebih dari 10. Sehingga masyarakat yang memiliki usaha rumah kos belum begitu memiliki pemahaman bahwa ada Peraturan Daerah yang tentang usaha yang paling banyak dipilih oleh masyarakat Banyuwangi

---

<sup>1</sup> Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Malang, 2008, halaman 37

<sup>2</sup> Hari Sabarno, *op.cit.* halaman 39

tersebut. Usaha rumah kos menjadi pilihan untuk mendapatkan penghasilan yang dapat dibilang mennguntungkan, karena banyaknya lapangan pekerjaan yang memadai serta tersedianya pendidikan yang lebih baik dibandingkan di daerah pedesaan.

Sistem pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah adalah *Self Assessment System*, merupakan sueatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang<sup>3</sup>. Masyarakat telah diberikan kebebasan pemerintah oleh pemerintah untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak. Kesadaran masyarakat dalam kasus usaha rumah kos yang lebih dari 10 kamar sangat berperan penting guna membantu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menggali pendapatan asli daerah, guna memperlancar pembiayaan pemerataan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat kurang memiliki kesadaran terhadap pajak. Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran

---

<sup>3</sup> Lutfi Effendi, *Pokok – Pokok Hukum Pajak*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, Halaman 58.

kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.<sup>4</sup> Masyarakat sungguh berperan penting dalam implementasi dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, perlu untuk menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah atau biasa disebut pembuat kebijakan (*policy maker*) dengan masyarakat yang berarti pelaksana kebijakan (*policy implimentors*) agar terciptanya tujuan dan sasaran sesuai dengan apa yang diharapkan dalam suatu kebijakan publik yang telah dibuat.

Namun pada kenyataannya, untuk pemilik rumah kos dengan kamar lebih dari 10 hanya beberapa saja yang melakukan kewajibannya yakni membayar pajak daerah seperti yang telah disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.2 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Dengan ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu mengambil upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pajak daerah.

Pemilihan judul penelitian skripsi ini berdasarkan kepada keingin tahuan peneliti akan bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak daerah, khususnya pajak daerah untuk rumah kos dengan kamar lebih dari 10. Maka dengan ini peneliti akan mengambil judul **“Peran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Dalam Optimalisasi Penerimaan Dari sektor Pajak Rumah Kos Lebih Dari 10 Kamar”**.

---

<sup>4</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, Halaman 97.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apa peran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam pengoptimalisasian pajak rumah kos lebih dari 10 kamar?
2. Bagaimanakah sanksi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak bagi pemilik rumah kos lebih dari 10 kamar?

## **C. PEMBAHASAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang didapat dengan cara melakukan observasi atau pengamatan<sup>5</sup>. Dikatakan penelitian empiris karena mengkaji dan menganalisis peran dinas pendapatan Kabupaten Banyuwangi dalam optimalisasi penerimaan dari sektor pajak rumah kos lebih dari 10 kamar sesuai pasal 4 ayat 3 huruf G Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Metode pendekatan yang digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dilakukan melalui penelitian di lapangan terhadap peran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam pengoptimalisasian pajak rumah kos.

Sumber dan data penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian dan data-data penelitian yang berupa data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu responden dengan melakukan wawancara dan pengamatan (observasi).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2002

<sup>6</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, halaman 12



Data-data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pengamatan dan wawancara terhadap narasumber yang dikumpulkan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dan pemilik rumah kos di Kabupaten Banyuwangi. Data sekunder meliputi data-data yang memberikan penjelasan mengenai data primer. Data sekunder diperoleh melalui kepustakaan berupa literatur-literatur, laporan-laporan, dokumen-dokumen resmi, penelitian, karya-karya ilmiah, hasil seminar, makalah, majalah, surat kabar, jurnal dan internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan<sup>7</sup>, terhadap pajak rumah kos dan laporan sosialisasi pemerintah dalam mensosialisasikan pajak rumah kos yang didapat dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

### **1. Peran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Dalam Pengomtimalisasian Pajak Rumah Kos Lebih Dari 10 Kamar**

Pajak daerah dan retribusi daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan bahwa ada 2 jenis pajak, yaitu jenis pajak provinsi dan pajak kabupaten /kota. Jenis-jenis pajak tersebut menjelaskan bahwa provinsi dan kabupaten/kota memiliki wewenang untuk memungut pajak, yang ditentukan dalam undang-undang tentang pajak daerah.

Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang pendapatan, sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Bayuwangi. Sumber

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, Halaman 141

pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi bersumber dari pajak daerah kabupaten banyuwangi, untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar roda pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Disahkannya undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, menjelaskan bahwa ruang lingkup pajak daerah yang diatur dalam peraturan daerah tersebut salah satunya terdapat pajak hotel. Obyek pajak hotel yang terdapat dalam peraturan daerah tersebut salah satunya terdapat pajak rumah kos dengan kamar lebih dari 10 kamar, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 3 Huruf G Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, adalah:

Rincian dalam obyek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Hotel;
- b. Motel;
- c. Losmen;
- d. Gubug Pariwisata;
- e. Wisma Pariwisata;
- f. Pesanggrahan;
- g. Rumah kos dengan kamar lebih dari 10;
- h. Rumah penginapan.

Pajak hotel dapat dipungut berdasarkan pelayanan yang telah disediakan oleh hotel, pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Dasar pengenaan pajak rumah kos dengan kamar lebih dari 10 kamar adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada pemilik usaha rumah kos, sedangkan tarif pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebesar 10%. Sistem yang digunakan dalam pemungutan

pajak hotel yakni dengan menggunakan sistem *Self Assessment*, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemilik usaha rumah kos atau wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi melakukan pemungutan pajak rumah kos dikarenakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi rumah kos termasuk obyek pajak, sehingga dinas pendapatan kabupaten banyuwangi baru melakukan pungutan pajak rumah kos pada tahun 2012. Sedangkan, Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi melakukan proses sosialisasi dan pendataan obyek pajak rumah kos yang belum terdaftar guna memenuhi target yang telah ditentukan, serangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Pada kenyataannya penerimaan pajak rumah kos dengan kamar lebih dari 10 kamar berdasarkan wawancara dengan Drs. Siswoyo selaku Kepala Seksi Pendataan dapat dikatakan masih belum optimal, dikarenakan jumlah rumah kos yang telah melakukan pembayaran pajak hanya 10 rumah kos.<sup>8</sup>

Peran yang dilakukan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak rumah kos dengan kamar lebih dari 10 sesuai wawancara dengan Bapak Hadi Siswanto SE selaku Kepala Bagian Penyusunan Program Pendapatan Kabupaten Banyuwangi adalah <sup>9</sup>:

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung sistem pengelolaan pajak rumah kos;

Dalam hal sarana dan prasarana masih mengalami kekurangan untuk melakukan pengelolaan pajak rumah kos, Sarana dan prasarana yang

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan kepala seksi pendataan Bapak Drs. Siswoyo pada 1 November 2014

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Hadi Siswanto SE selaku Kepala Bagian Penyusunan Program Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi pada 2 desember 2014

dimaksud adalah peralatan kantor, perlengkapan kantor dan gedung/kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.

- b. Mempermudah pelayanan wajib pajak mengenai pajak rumah kos;

Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi melayani wajib pajak dengan cara memudahkan pelayanan dan dengan waktu yang sesingkat singkatnya sesuai Standart Operasional Pelayanan (SOP). Dengan demikian, wajib pajak rumah kos akan merasa puas dan dimudahkan oleh Dinas Pendapatan dalam hal pelayanan.

- c. Mengoptimalkan tingkat koordinasi antar instansi;

Tingkat koordinasi antar lembaga dan inter instansi yang lemah. Lemahnya koordinasi yang dimaksud, dapat terjadi diintern satuan kerja maupun antar satuan kerja sering menjadi penghambat pelaksanaan tugas-tugas kantor. Dalam hal ini, Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi tetap mengupayakan tingkat koordinasi antar instansi yang lebih baik lagi guna pelaksanaan tugas-tugas dan menganggap bahwa permasalahan ini tidak menjadi alasan atau hambatan untuk tetap memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap para wajib pajak.

- d. Mengoptimalkan tingkat kepedulian dan kesadaran wajib pajak rumah kos terhadap pentingnya pembayaran pajak secara tepat waktu.

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam hal membayar pajak secara tepat waktu dan tingkat kejujuran dalam menentukan besaran perhitungan pengenaan pajak dapat berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan. Upaya Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dalam mengatasi permasalahan ini secara turun langsung ke lapangan untuk

melakukan sosialisasi mengenai pentingnya tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap pajak rumah kos, melakukan pendataan secara langsung terhadap para wajib pajak, dan melakukan penagihan pajak terhadap para obyek pajak rumah kos dengan mengikut sertakan instansi-instansi lain yang saling berkaitan.

Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi telah memiliki penjabaran tujuan yang digunakan untuk mencapai suatu target yang secara nyata, terget yang dimaksudkan adalah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan target indikator kinerja. Jumlah pajak daerah meningkat secara berturut-turut, yakni pada tahun 2011 sebesar 10%, tahun 2012 sebesar 10,5%, tahun 2013 sebesar 11%, tahun 2014 sebesar 11,5%, dan pada tahun 2015 sebesar 12%. Target atau sasaran ini sangat realistis untuk dapat diwujudkan, karena pada tahun 2006-2010 mengalami peningkatan rata-rata setiap tahunnya sebesar 9,93%, data diatas didapatkan dari hasil studi dokumen dari Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi. Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi setelah mengetahui bahwa usaha rumah kos dengan kamar lebih dari 10 mengalami peningkatan yakni dengan cara mendatangi langsung pemilik usaha rumah kos dengan kamar lebih dari 10 untuk memberikan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak daerah sesuai dengan rincian dari obyek pajak hotel.. Selanjutnya Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi melakukan pendataan kepada pemilik usaha rumah kos dengan kamar lebih dari 10, dengan adanya data-data pemilik usaha tersebut memudahkan untuk melakukan penagihan apabila obyek pajak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak daerah. Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi menganggap bahwa tindakan-

tindakan tersebut diambil atas dasar kurang sadarnya masyarakat daerah kabupaten bayuwangi, untuk melaksanakan tindakan tersebut Dinas Pendapatan mengikut sertakan instansi lain untuk membantu berjalannya proses pelaksanaan dari tugas pokok Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.

Tindakan yang diambil oleh dinas kabupaten banyuwangi tersebut dapat dikatakan berhasil, dikarenakan meningkatnya jumlah pajak daerah mengenai usaha rumah kos dengan kamar lebih dari 10 mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Berikut adalah tabel dari rincian progres dari pajak daerah mengenai pajak rumah kos dengan kamar lebih dari 10 mulai tanggal 2012-2014:

**Tabel 1.1**  
**Rincian Progres Dari Pajak Daerah Mengenai Pajak Rumah Kos Dengan Kamar Lebih Dari 10**

<b>Tahun</b>	<b>Triwulan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
2009 - 2012		3.250.000	5.455.500
2013	Triwulan I	2.400.000	990.000
	Triwulan II	2.400.000	1.567.500
	Triwulan III	2.400.000	1.240.000
	Triwulan IV	2.400.000	1.640.000
2014	Triwulan I	600.000	1.340.000
	Triwulan II	600.000	1.850.000
	Triwulan III	1.900.000	2.103.250

Sumber : *Data primer, diolah, Desember 2014*

## **2. Sanksi Yang Diberikan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Membayar Pajak Bagi Pemilik Rumah Kos Lebih Dari 10 Kamar**

Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dalam mengatasi permasalahan bagi wajib yang tidak melakukan pembayaran pajak rumah kos dengan kamar lebih dari 10, menurut Bapak Hadi Siswanto SE selaku Kepala Bagian Penyusunan Program Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi telah menerapkan sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.<sup>10</sup> Sanksi administrasi yang dimaksud adalah:

1. Memberikan surat panggilan kepada wajib pajak rumah kos sebanyak 3x;
2. Memberikan peringatan tertulis kepada wajib pajak rumah kos;
3. Meminta penghentian sementara atau tetap terhadap pemanfaatan bangunan rumah kos kepada wajib pajak rumah kos.

Sedangkan sanksi pidana yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi terhadap wajib pajak rumah kos yang tidak melakukan pembayaran pajak menerapkan sanksi sesuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Pasal 109 No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dipidana dengan pidana kurungan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Hadi Siswanto SE selaku Kepala Bagian Penyusunan Program Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi pada 2 desember 2014

paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Peran yang dilakukan dinas pendapatan Kabupaten Banyuwangi dalam pengoptimalisasian pajak rumah kos lebih dari 10 kamar adalah:
  - 1) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung sistem pengelolaan pajak rumah kos;
  - 2) Mempermudah pelayanan wajib pajak mengenai pajak rumah kos;
  - 3) Mengoptimalkan tingkat koordinasi antar instansi;
  - 4) Mengoptimalkan tingkat kepedulian dan kesadaran wajib pajak rumah kos terhadap pentingnya pembayaran pajak secara tepat waktu.
- b. Sanksi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak bagi pemilik rumah kos lebih dari 10 kamar berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yang dimaksud adalah :
  - 1) Memberikan surat panggilan kepada wajib pajak rumah kos sebanyak 3x;



- 2) Memberikan peringatan tertulis kepada wajib pajak rumah kos;
- 3) Meminta penghentian sementara atau tetap terhadap pemanfaatan bangunan rumah kos kepada wajib pajak rumah kos.

Sedangkan sanksi pidana yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi terhadap wajib pajak rumah kos yang tidak melakukan pembayaran pajak menerapkan sanksi sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- 2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

## **2. Saran**

Dari kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi harus turun langsung ke lapangan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap pajak daerah rumah kos, melakukan pendataan secara langsung terhadap para wajib pajak;

- b. Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi lebih meningkatkan target progres dari pajak daerah mengenai pajak rumah kos dengan kamar lebih dari 10, karena apabila dilihat dari realisasinya masih dapat dikatakan terlalu kecil, sehingga dinas pendapatan harus menggali sebanyak mungkin obyek pajak rumah kos dengan kamar lebih dari 10 dengan cara turun secara langsung ke lapangan;
- c. Memberikan sanksi yang lebih tegas oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi kepada wajib pajak yang tidak mendaftarkan dan membayar pajak mengenai pajak rumah kos dengan kamar lebih dari 10;
- d. Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi tetap lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada sebagai alat untuk mendukung tugas pokok dan fungsi dinas pendapatan sendiri.

#### **D. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku:**

- Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2002
- Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Malang, 2008
- Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013
- Lutfi Effendi, *Pokok – Pokok Hukum Pajak*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia,  
Jakarta, 2012

Wawancara:

Wawancara dengan kepala seksi pendataan Bapak Drs. Siswoyo pada 1  
November 2014

Wawancara dengan Bapak Hadi Siswanto SE selaku Kepala Bagian  
Penyusunan Program Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi pada 2  
desember 2014